

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi dengan menjamin keterlibatan warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan paham dan sistem politik yang biasanya disebut sering disebut dengan *power of people* yang berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Perkembangan demokrasi di Indonesia secara perlahan-lahan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan serta ke arah yang lebih baik. Terbukanya *kran* arus kebebasan sebagai fondasi dasar dari bangunan demokrasi terus merambah ke berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali dalam pemilihan umum (pemilu).

Demokrasi memang tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan pemerintahan dan berbagai kegiatan-kegiatan politik di suatu negara. Semua proses politik dan lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Oleh karena demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan politik, konsultasi atau dialog dengan rakyat dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas²

Salah satu pilar dalam negara demokrasi adalah dengan diadakannya mekanisme penyaluran pendapat melalui pemilihan umum, yang diselenggarakan secara langsung,

¹ Saiful Mujani, R. William Liddle, & Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan Media Utama. 2012. Hlm. 11.

² Miftah Toha, *Op. Cit.* Hlm 107

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran pendapat warga negara yang sangat principal dan mendasar. Pemilu juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Prinsip pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan secara langsung merupakan salah satu bagian dari pesta demokrasi di Indonesia.

Pemilihan legislatif sebagai sebuah bentuk pesta demokrasi yang mengharuskan warga negara untuk ikut terlibat langsung dan aktif dalam proses pemilihan, baik yang maju dalam Pemilihan umum legislatif (Pileg) maupun yang akan memberikan suara. Pemilu legislatif menjadi instrumen bagi negara ini untuk melakukan sirkulasi elit dalam rangka kesinambungan berbangsa dan bernegara. Pilihannya adalah dengan pelaksanaan sistem demokrasi sehingga semua warga negara memiliki andil dan peluang untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tiap lima tahun sekali.



Namun penyelenggaraan pemilu memang bukan hanya seperti pengadaan acara lain yang mudah, penyelenggaraan pemilu tentunya menuntut negara mengeluarkan dana yang cukup besar untuk setiap kali pelaksanaannya baik itu di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan kepala daerah (pilkada), dan lain-lain tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Maka dari itu penyelenggaraan pemilu secara serentak bukan hanya untuk membereskan beberapa masalah di pemilu tetapi juga menekan dana yang begitu besar dalam pemilu. Pelaksanaan ini didasari oleh putusan MK No 14 / PUU -11/2013 dan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi landasan dilaksanakannya pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Penyelenggaraan pemilu serentak, atau pemilu serentak nasional (memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu serentak daerah (memilih DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah) dapat mengatasi kompleksitas penyelenggaraan pemilu.³

Pelaksanaan secara serentak ini bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam melaksanakan pemilu, meminimalisir biaya peserta pemilu, menekan kasus politik uang yang melibatkan pemilih dan juga merampingkan skema pemerintahan yang nantinya akan berganti secara bersamaan. Pemilihan umum sebagai agenda lima tahunan adalah momen penting untuk menentukan pilihan rakyat yang akan menjadi perwakilan di pemerintahan yang bertugas membangun bangsa.

Dalam undang-undang No 8 tahun 2012 telah dijelaskan mengenai fungsi pemilihan umum yaitu sebagai sarana untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan hukum, harus dilaksanakan menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Kebanyakan negara-negara demokrasi di dunia, menjadikan pemilihan umum sebagai lambang sekaligus tolak

³ Isi putusan MK No 14/PUU-XI/2013

ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Masyarakat bebas menentukan pilihannya sendiri yang menurutnya pantas dan layak untuk dijadikan pemimpin serta dapat mewakili aspirasinya.

Pemilihan umum juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk ikut berkompetisi meraih kekuasaan tanpa melihat jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga, perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk terlibat aktif dalam dunia politik, termasuk untuk duduk di lembaga legislatif. Berbicara mengenai perempuan, salah satu fenomena yang menarik dalam kegiatan politik Indonesia yang tengah berkembang pada saat sekarang ini adalah keterwakilan kaum perempuan dalam dunia politik terutama pada lembaga legislatif.

Keterlibatan perempuan pada bidang politik menjadi perbincangan dari berbagai kalangan karena selama ini anggapan tentang perempuan yang dijadikan sebagai pelengkap dari laki-laki⁴ sehingga menyebabkan terbatasnya ruang gerak perempuan di ranah publik, selain itu perempuan dianggap tidak pantas untuk terlibat dalam dunia

⁴ Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata. Secara kultural dimana sudut pandang patrinal (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai sendi kehidupan. Lihat pada: Muhammad Yusuf Pambudi. 2012. Perempuan Dan Politik: Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampan. *Jurnal Politik Muda*. Vol 1 No. 1. Hlm 89.

perpolitikan. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan salah satu tolak ukur sampai tahap mana sebuah proses demokrasi membuahkan hasil. Keterwakilan perempuan sesungguhnya merupakan pemenuhan prinsip partisipasi, kesetaraan, toleransi atas kemajemukan, perlindungan HAM serta keterbukaan dan tanggung gugat.

Salah satu tindakan nyata untuk menciptakan kesetaraan dalam ranah politik adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bahwa partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Adanya kebijakan ini telah membawa angin segar bagi perjalanan perempuan dalam dunia politik. Kebijakan *affirmative action* ini tentu memberikan warna baru bagi pola pelaksanaan pemilu di setiap Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Keberadaan calon perempuan tentu memberikan semangat baru bagi lahirnya tokoh-tokoh politik baru yang diharapkan juga mampu memberikan pemikiran demi perubahan baru dalam pola pembangunan pada wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan legislatif serta keterlibatan perempuan dalam politik sangat berkaitan erat dengan budaya Sumatera Barat. Budaya tersebut mengakar sampai kedalam sistem politik, yang menjadikan laki-laki mendominasi untuk



mendapatkan hak dan partisipasi politik. Budaya dan politik memiliki kaitan yang erat karena budaya yang ditimbulkan oleh masyarakat tersebut berpengaruh kepada kondisi politik. Kota Padang menjadi salah satu kota yang ada di Indonesia dan merupakan Ibu Kota dari Sumatera Barat yang dikenal dengan suku Minangkabau. Suku tersebut memiliki unsur kekerabatan matrilineal, masyarakat di Minangkabau cenderung lebih mendahulukan kaum pria untuk menjadi pemimpin. Menurut Schneider dalam masyarakat matrilineal pemilik properti adalah perempuan, sedangkan pemilik otoritas adalah laki-laki.⁵

Otoritas tradisional adalah laki-laki. Sebuah *paruik* (sub-garis keturunan) dipimpin oleh tungganai, kaum (garis keturunan) dipimpin oleh panghulu andiko (kepala penghulu), suku (klan) dipimpin oleh panghulu pucuk, dan nagari (desa) dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari (dewan musyawarah adat) yang mewakili semua panghulu di nagari. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pria selalu tampil di semua *front* dimana pengambilan keputusan berlangsung.⁶ Posisi penghulu di minang sangat tinggi dan segala keputusan diputuskan oleh penghulu. Posisi perempuan di Minang selalu berada di belakang kaum laki-laki.

Budaya yang cenderung patriarki seperti ini mengakar dalam kehidupan lokal sebab budaya muncul karena adanya kebiasaan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa

⁵ David Schneider. 1974. *Matrilineal Kinship*. California: University California Press. Hlm. 23.

⁶ Jendrius. 2017. *Women In Minangkabau Nagari Government: Gender, Negotiating And Power At The Local Level*, Bukittinggi: CV. Rumahkayu Pustaka Utama. Hlm. 27.

laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan. Budaya patriarki menjadikan perempuan akan selalu dikuasai oleh laki-laki padahal potensi perempuan juga sangat dibutuhkan dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Kebiasaan ini tentu akan merugikan kaum perempuan, bahwa ada hak-hak yang harus diperjuangkan oleh kaum perempuan, misalnya hak untuk bisa mendapatkan posisi yang sama dalam bidang politik.

Kepercayaan dan nilai patriarki di Sumatera Barat dapat dikatakan menjadi salah satu faktor pendorong bagi kaum perempuan untuk ikut bersaing dalam kontestasi politik. Dalam hal keterwakilan perempuan di DPRD, bisa dilihat pada fenomena yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, permasalahan gender juga begitu kuat, walaupun Sumatera Barat memiliki sistem matrilineal (garis keturunan ibu) namun dalam konteks tataran sosial, budaya dan politik, laki-laki lebih dominan dari perempuan. Mochtar Naim menunjukkan bahwa perempuan minangkabau memang memiliki beberapa keistimewaan untuk dapat berlaku sebagai pemeran aktif, akan tetapi peranan politik yang esensial tetap ada pada laki-laki.⁷



Salah satu persaingan perempuan di ranah politik yang terlihat jelas yaitu Irawati Meuraksa. Irawati Meuraksa merupakan anggota legislatif perempuan terpilih, yang mampu meraih kemenangan di pemilihan legislatif Kota Padang tahun 2019 lalu. Irawati Meuraksa merupakan calon legislatif perempuan yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), yang pada pemilu 2019 lalu Irawati Meuraksa berada pada

⁷ Mochtar Naim. 1996. *Wanita di Sumatra Barat (beberapa kumpulan pemikiran dan hasil penelitian)*. Padang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Hlm. 50.

Daerah Pemilihan (Dapil) IV⁸ berhasil menduduki kursi DPRD dengan perolehan suara 3.664 suara.

Sebagai pendatang baru yang ikut berkompetisi dan terpilih menjadi anggota DPRD Kota Padang, ini menjadi fenomena yang menarik bagi peneliti karena ditengah budaya patriaki, Irawati Meursaka berhasil meyakinkan masyarakat untuk memilih dirinya. Tentunya kemenangan yang diraih Irawati Meuraksa tidak terlepas dari strategi politik yang dilakukannya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Di tengah budaya patriaki calon anggota legislatif perempuan terpilih, peneliti menduga Irawati Meuraksa berhasil melakukan strategi politik yang sangat baik yang akan peneliti jabarkan pada penelitian ini

Kemenangan calon legislatif perempuan Irawati Meuraksa menarik perhatian peneliti untuk membahas bagaimana strategi politik yang digunakan calon legislatif ini. Irawati Meuraksa merupakan caleg pendatang baru dan belum memiliki pengalaman di bidang politik sebelumnya, serta Irawati Meuraksa pada awalnya tidak begitu diperhitungkan sama sekali karena sosok perempuan yang dianggap tidak pantas untuk terlibat dalam dunia politik namun, Irawati Meuraksa berhasil memenangkan perolehan suara di pemilu legislatif.

Kemenangan yang diraih oleh Irawati Meuraksa tentu berjalan tidak mudah. Kemenangan tersebut bukan hanya dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki, tetapi banyak faktor yang melatarbelakanginya. Kemenangan kandidat pemula perempuan



⁸ Dapil IV Kota Padang yakni Padang Timur dan Padang Selatan

biasanya sangat bergantung pada strategi politiknya. Menurut Peter Shcroder ada 2 strategi politik yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana strategi yang dijalankan seseorang, yakni strategi *offensive* dan strategi *deffensive*

Beberapa strategi offensive dan defensive yang dijalankan Irawati yakni partai pengusung PAN yang pada pileg 2019 berada di urutan ketiga suara terbanyak, media yang digunakan sebagai alat untuk media kampanye, tim sukses yang solid, sumber daya ekonomi yang penting bagi penggerak kampanye, peran organisasai partai dimiliki dan citra *image* yang dimiliki oleh Irawati Meuraksa. Maka, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menggambarkan strategi politik yang digunakan Irawati Meuraksa sesuai dengan teori yang di gagas oleh Peter Schroder yaitu teori strategi politik *offensive* dan *defensive*.

Dengan persaingan politik yang begitu ketat di Kota Padang, peneliti berasumsi Irawati Meuraksa sangat baik dalam menjalankan strategi politik *offensive* dan *defensive* dalam memenangkan kontestasi politik. Kemenangan Irawati ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan kajian strategi politik apa yang dijalankan oleh tim sukses Irawati. Pada penelitian ini nantinya bertujuan untuk ingin mengetahui dan menjabarkan apa saja stategi dari tim sukses Irawati Meuraksa dalam memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kota Padang.

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang sekiranya menjadi sumber referensi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Niadharna dengan judul “Strategi Pemasaran Politik Pasangan Sambari-Qosim Dalam Pemilihan Kepala Daerah Gresik 2015”. Hasil penelitian ini



ialah pasangan Sambari dan Qosim melakukan strategi pemasaran politik dengan melakukan pendekatan dan branding politik yang sudah dilakukan sejak Sambari dan Qosim menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2010.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Heru Purnama Putra dengan judul “Perbandingan Strategi Caleg Perempuan Dalam Usaha Memenangkan Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Padang”. Dalam penelitian ditinjau dengan strategi Segmentasi, Targetting dan Positioning serta faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masyarakat dalam menerapkan strategi politik di dalam Pemilu dan pengelolaan modal sosial yang dimiliki sekitar lingkungannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wanda Pratama dengan judul “Pemasaran Politik (*Political Marketing*) Siti Izzati Aziz Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat”, penelitian ini menjelaskan kemenangan Siti Izzati Aziz dengan menggunakan teori marketing politik, dengan hasil penelitian hal yang sangat dominan dari kemenangan Siti Izzati Aziz adalah karena faktor figur orang tuanya yang sangat membantu terhadap dirinya dalam meraih suara pada pemilu legislatif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yusran, dengan judul “Strategi politik Yusnidarti (incumbent) dan Elva Endayani (New comer) dalam Pemilu legislatif Kabupaten Sijunjung tahun 2014”. Hasil penelitian Yusran adalah membandingkan strategi calon *incumbent* dan *New corner* dalam memenangkan suara pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sijunjung, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari calon incumbent dengan calon yang baru mengikuti pemilu legislatif.



Penelitian ini menjadi beda karena penelitian ini menggunakan teori strategi politik dari Peter Schroder untuk menjelaskan strategi apa yang digunakan Irawati Meuraksa dalam pemilihan umum legislatif 2019. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi Politik Irawati Meuraksa dalam memenangkan pemilihan umum legislatif di kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan amanat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap warga memiliki kesamaan hak politik dan kedudukan tanpa membedakan suku, agama, maupun jenis kelamin. Tujuannya agar terdapat kesetaraan hak dalam politik tanpa membedakan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama di bidang Politik.

Pemilu legislatif di Kota Padang tahun 2019 diikuti oleh 16 partai politik, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Bulan Bintang (PBB), PKPI, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Perasatuan Indonesia (Perindo), Garuda. Partai Gerindra menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak disusul PKS dan PAN.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Nomor 281/HK.03-Kpl/1371/KPU-Kot/VIII/2019 KPU Kota Padang menetapkan 45 anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut partai politik yang paling banyak memperoleh kursi adalah Partai Gerindra. Partai Gerindra memperoleh paling banyak kursi dengan 11 kursi, diurutan kedua PKS dengan 9 kursi dan ditempat ketiga PAN sebanyak 7 Kursi dan Demokrat dengan 6 Kursi. Partai Golkar, PDIP dan PPP masing-masing memperoleh 3 kursi, berkarya 2 kursi dan Partai Nasdem dengan 1 kursi. Salah satu calon anggota legislatif perempuan terpilih pada Dapil Padang IV, Irawati Meuraksa bernasib menangkan kontestasi politik. Berikut daftar anggota DPRD dapil Padang IV yang terpilih.

Tabel 1.1
Perolehan Suara Anggota Legislatif Terpilih pada Dapil 4 Kota Padang

Anggota Legislatif	Partai Pengusung	Perolehan Suara
Boby Rustam	Gerindra	2.057
Meilasa Waruwu	PDIP	1.318
Helmi Moesim AY	Berkarya	2.934
Muhidi	PKS	4.589
Amril Amin	PAN	5.825
Irawati Meuraksa	PAN	3.664
Ilham Maulana	Demokrat	3.634

Sumber : KPU Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 7 anggota DPRD terpilih, yakni Bobby Rustam dari Partai Gerindra yang memperoleh 2.057 suara, Meilasa Waruwu dari PDIP yang memperoleh 1.318 suara, Helim Moesim dari Partai Gerindra yang memperoleh 2.934 suara, Muhidi dari PKS yang memperoleh 4.589 suara, Amril Amin dari PAN yang

memperoleh 5.825 suara, Irawati Meuraksa dari PAN yang memperoleh 3.664 suara, dan terakhir Ilham Maulana dari Partai Demokrat yang memperoleh 3.634 suara. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 lalu di dapil IV Kota Padang, PAN memperoleh 12.417 suara. Pemilihan umum Indonesia dengan menggunakan metode Saint Lague maka PAN memperoleh 2 kursi dari kuota 7 kursi yang tersedia pada dapil IV Kota Padang.

Tabel 1.2 Perolehan Kursi Partai Politik Pada Dapil IV Kota Padang

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI								JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		
			SUARA SAH	PERING KAT	SUARA SAH	PERING KAT	SUARA SAH	PERING KAT	SUARA SAH	PERING KAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,824	1,824.00	-	608.00	-	364.80	-	260.57	-	-
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	20,397	20,397.00	2	6,799.00	6	4,079.40	-	2,913.86	-	2
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4,303	4,303.00	10	1,434.33	-	860.60	-	614.71	-	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4,877	4,877.00	7	1,625.67	-	975.40	-	696.71	-	1
5	PARTAI NasDem	3,787	3,787.00	-	1,262.33	-	757.40	-	541.00	-	-
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	2,308	2,308.00	-	769.33	-	461.60	-	329.71	-	-
7	PARTAI BERKARYA	1,474	1,474.00	-	491.33	-	294.80	-	210.57	-	-
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	21,553	21,553.00	1	7,184.33	5	4,310.60	9	3,079.00	-	3
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2,029	2,029.00	-	676.33	-	405.80	-	289.86	-	-
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4,615	4,615.00	8	1,538.33	-	923.00	-	659.29	-	1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1,130	1,130.00	-	376.67	-	226.00	-	161.43	-	-
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	8,063	8,063.00	4	2,687.67	-	1,612.60	-	1,151.86	-	1
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2,894	2,894.00	-	964.67	-	578.80	-	413.43	-	-
14	PARTAI DEMOKRAT	11,230	11,230.00	3	3,743.33	-	2,246.00	-	1,604.29	-	1
19	PARTAI BULAN BINTANG	1,416	1,416.00	-	472.00	-	283.20	-	202.29	-	-
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	786	786.00	-	262.00	-	157.20	-	112.29	-	-
JUMLAH		92,686									10

Sumber: KPU Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas PAN dengan perolehan suara 12.417 berhasil menduduki 2 kursi DPRD. PAN yang mendapatkan 2 kursi tersebut dikonversi dari perolehan total suara dengan menggunakan metode *saint lague*. Suara 12.417 yang diperoleh dibagi dengan bilangan pembagi 1 sehingga didapati hasil yaitu 12.417. Dengan hasil 12.417 tersebut caleg PAN, Amril Amin, berhasil mendapatkan 1 kursi dengan perolehan suara yang didapatinya sebanyak 5.825 suara. Kemudian 12.417 dibagi dengan bilangan pembagi 3 sehingga didapati hasil yaitu 4.139. Dengan hasil 4.139 tersebut caleg perempuan PAN, Irawati Meuraksa, juga berhasil mendapatkan 1 kursi dengan perolehan suara yang didapatinya sebanyak 3.664 suara. Berikut perolehan suara dan peringkat caleg dari PAN pada dapil IV Kota Padang:

Tabel 1.3 Perolehan Suara Caleg PAN Dapil IV Kota Padang

No Urut	Nama Caleg	Suara Sah	Peringkat
1	Amril Amin	5.825	1
2	Irawati Meuraksa	3.664	2
3	Nila Gusma Linda	338	4
4	Rifza Warsil Panca Sakti	1.070	3
5	Suresman Riad	160	6
6	Dessy Sagita	85	7
7	Agusman	234	5

Sumber: KPU Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas yang berhasil mendapatkan 2 kursi pada dapil IV Kota Padang adalah Amril Amin dan Irawati Meuraksa dengan perolehan suara masing-masing 5.825 dan 3.664 suara. Perolehan kursi Partai PAN mengalami peningkatan 1 kursi dibandingkan pada pemilu 2014 lalu, pada pemilu 2014 PAN memperoleh 6 kursi dan pada pemilu 2019 memperoleh 7 kursi. Anggota legislatif terpilih dari Partai PAN, Irawati Meuraksa merupakan salah anggota legislatif perempuan yang meraih kemenangan pada pemilihan legislatif tahun 2019. Irawati Meuraksa merupakan calon legislatif perempuan dari PAN untuk DPRD Kota Padang yang mana pada pemilu 2019 menempati Dapil IV dan berhasil meraih kemenangan. Kemenangan Irawati Meuraksa merupakan bukti bahwa perempuan juga mampu bersaing pada kontestasi politik pemilihan legislatif yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Berikut data perolehan suara anggota legislatif perempuan yang memenangkan pemilihan legislatif di Kota Padang tahun 2019.



Tabel 1.4
Daftar Nama Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Legislatif 2019

Anggota Legislatif	Daerah Pemilihan	Partai Politik	Perolehan Suara
Yuhilda Darwis	Padang I	PPP	1.945
Salisma	Padang 2	Demokrat	1.492
Elly Thrisyanti	Padang 3	Gerindra	4.162
Nila Kartika	Padang 3	Demokrat	2.045
Dewi Susanti	Padang 3	Gerindraa	3.603
Irawati Meuraksa	Padang 4	PAN	3.664

Sumber : KPU Kota Padang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 7 anggota legilatif perempuan yang terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2019. Perolehan suara tertinggi diraih oleh Elly Thrisyanti dari partai Gerindra dengan perolehan 4.162, dan perolehan suara tertinggi kedua diraih oleh Irawati Meuraksa dari PAN dengan perolehan 3.664 suara. Kemudian dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa perwakilan perempuan terbanyak berada di daerah pemilihan Padang 3, yang diraih 2 orang dari partai Gerindra, Elly Thrisyanti dan Dewi Susanti dan seorang dari Partai Demokrat yakni Nila Kartika.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bawah Irawati Meuraksa merupakan satu-satunya perempuan yang terpilih dari PAN serta juga satu-satunya perempuan yang meraih kemenangan di Dapil 4. Jika melihat pada pemilihan legislatif tahun 2014 lalu terdapat 7 orang perempuan yang terpilih, namun pada pemilihan legislatif tahun 2019, keterpilihan anggota legislatif perempuan mengalami penurunan menjadi 6 orang. Hal ini menurut peneliti merupakan sebuah bentuk penurunan keterlibatan perempuan dalam bidang politik khususnya dalam legislatif dan sangat jauh dari kuota 30 persen *affirmative action*.



Tabel 1.5
Perbandingan Anggota Legislatif Perempuan Kota Padang Peride 2014-2019 dan Periode 2019-2024

No	Periode 2014-2019		Periode 2019-2024	
	Nama	Partai Politik	Nama	Partai Politik
1	Yuhilda Darwis	PPP	Yuhilda Darwis	PPP
2	Elly Thrisyanti	Gerindra	Elly Thrisyanti	Gerindra

Periode 2014-2019			Periode 2019-2024	
No	Nama	Partai Politik	Nama	Partai Politik
3	Dewi Susanti	Gerindra	Dewi Susanti	Gerindra
4	Nilai Kartika	PPP	Nilai Kartika	PPP
5	Dian Anggraini	Nasdem	Irawawti Meuraksa	PAN
6	Malinda Rose	Nasdem	Salisma	Demokrat
7	Gustin Pranoma	Demokrat		

Sumber: KPU Kota Padang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perolehan kursi anggota legislatif perempuan mengalami penurunan. Pada peride tahun 2014-2019 terdapat 7 anggota legislatif perempuan sedangkan pada periode 2019-2024 keterpilihan perempuan mengalami penurunan menjadi 6 orang anggota legislatif perempuan. Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat anggota legislatif periode 2014-2019 terpilih kembali pada periode 2019-2024, yakni Yuhilda Darwis, Elly Thrisyanti, Dewi Susanti dan Nilai Kartika. Selain itu, juga terdapat pendatang baru yang terpilih dalam pemilihan legislatif tahun 2019, yakni Irawawti Meuraksa dan Salisma.

Dalam hal keterwakilan di legislatif, Kota Padang kurang menaruh perhatian yang cukup terhadap perwakilan perempuan karena selama ini yang lebih dominan adalah kaum laki-laki. Hal ini jelas terlihat dari keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang periode 2014-2019 yang hanya menempatkan 7 orang. Bahkan pada periode 2019-2024 mengalami penurunan dan perubahan yang begitu signifikan dimana anggota DPRD perempuan pada periode ini terdapat 6 orang saja dimana dan 4 calon

incumbent yang terpilih kembali dan 2 wajah baru yang salah satunya, Irawati Meuraksa.

Terpilihnya Irawati Meuraksa sebagai anggota legislatif perempuan merupakan jawaban dari kebijakan *affirmative action*, maka dalam hal ini peneliti melihat bahwa Irawati Meuraksa telah menjawab tindakan *affirmative action* dalam konteks pemilu legislatif dengan keikutsertaannya sebagai caleg perempuan mampu untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Undang-Undang Pemilu No. 10 tahun 2008 yang berbicara tentang 30% keterwakilan perempuan, sudah mulai diberlakukannya *affirmative action* di Indonesia. Dalam Konteks politik, *affirmative action* dilakukan untuk mendorong agar jumlah anggota legislatif perempuan lebih representative.

Kemenangan Irawati Meuraksa sebagai satu salah satu perempuan pendatang baru yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Padang merupakan sebuah usaha yang patut diberi apresiasi yang sangat tinggi. Upaya yang dilakukan Irawati Meuraksa sebagai calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemilu legislatif memang tidaklah mudah, Irawati Meuraksa melihat adanya peluang yang mampu menaikkan pamornya dan mendapatkan kepercayaan bagi konstituennya.

Irawati Meuraksa merupakan anggota legislatif perempuan yang meraih kemenangan pada pileg 2019 lalu. Kemenangan ini membuktikan bahwa perempuan juga mampu untuk bersaing dengan laki-laki. Yang menarik perhatian peneliti adalah Irawati sebagai pendatang baru, yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam kontestasi politik namun pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu mampu menduduki 1 kursi di DPRD Kota Padang. Selain itu sebagai seorang perempuan di tengah



masyarakat yang memiliki pengaruh budaya patriaki yang kuat, yang mendahulukan laki-laki, Irawati Meuraksa mampu meraih kemenangan pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Irawati Meuraksa lahir dan besar di Kota Padang, merupakan anak dari Alm M. Jamin, salah satu pejabat di Pelindo Teluk Bayur pada tahun 1890. Irawati Meuraksa merupakan alumni SMPN 1 Padang dan SMAN1 Padang, dan pada tahun 1993 meraih gelar sarjana pertanian di Universitas Andalas. Irawati Meuraksa Dapil IV dari partai PAN merupakan kandidat perempuan yang lolos dalam pemilihan umum periode 2019-2024. Irawati Meuraksa merupakan penyiar radio swasta di Padang yang aktif dalam kelompok-kelompok majelis taklim dan pendiri swalayan di Kota Padang.

Irawati Meuraksa terjun dalam dunia politik dan bergabung dengan partai PAN. Jabatan terakhir Irawati di PAN sebelum menjadi calon legislatif 2019 ialah sebagai Ketua Partai Amanat Nasional Kecamatan Padang Timur. Irawati menjadi calon legislatif 2019 Dapil IV yang terdiri dari Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan (Info.co.id, 2019). Irawati Meuraksa dikenal oleh masyarakat di kecamatan Padang Timur sebelum mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Irawati menjadikan PAN sebagai wadah untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kecamatan Padang Timur.

Pada pelaksanaan pemilu, para calon kandidat berlomba-lomba dalam mengambil hati masyarakat. Tentunya hal itu bertujuan agar hak suara dari setiap masyarakat dapat diperoleh oleh kandidat tersebut. Untuk mempengaruhi pilihan masyarakat calon kandidat menggunakan berbagai cara, salah satunya ialah



menggunakan strategi politik yang merupakan suatu strategi untuk memenangkan kandidat atau suatu partai politik dalam kontestasi politik.

Strategi dalam politik khususnya dalam masa kampanye akan menentukan bagaimana nasib seorang pemimpin, apakah bisa mendapatkan simpati dari pemilih atau tidak. Menariknya, strategi yang jelas disepakati bersama akan menyebabkan perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat, dalam strategi biasanya terdiri dari perencanaan dan manajemen untuk mendapatkan suatu tujuan, sehingga kandidat atau partai bisa memetakan arah perencanaan tersebut

Menurut Peter Schroder, strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi berbicara masalah teknik pendekatan kontestan pada kelompok pemilih. Oleh karena itu, strategi politik harus dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pertarungan politik. Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih, menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau kontestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak-pihak mana yang akan dicoblos para pemilih.

Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa kontestan yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Dalam sebuah pemilihan umum, strategi politik sering dilakukan oleh kandidat demi mendapatkan suara dari



konstituennya. Fenomena ini terjadi pada pemilu di Kota Padang yang dilakukan oleh Caleg Irawati Meuraksa dalam memenangkan pemilihan legislatif di Kota Padang. Peneliti melihat bahwa Irawati Meuraksa melakukan kampanye berdasarkan strategi politik yang sangat baik dan melihat penyebab kemenangan yang diraih tidak lepas dari strategi politik yang dilakukan.

Peneliti berasumsi ada beberapa faktor penyebab kemenangan Irawati Meuraksa jika dilihat dari strategi yang dilakukan. Pertama, peran PAN sebagai partai pengusung tentunya sangat berpengaruh dalam kemenangan Irawati Meuraksa. Partai Amanat Nasional yang memiliki struktur yang komplit tentunya memudahkan Irawati Meuraksa untuk menyentuh setiap elemen yang ada didalam masyarakat Kota Padang. Disamping itu, PAN juga memiliki militan sehingga dapat memikat hati para pemilih militan untuk memilih calon yang diusung PAN. Tidak hanya itu PAN juga memiliki sayap partai, PUAN (Perempuan Amanat Nasional) dan keterikatan dengan Muhammadiyah yang tentunya juga memiliki pengaruh dalam strategi yang dilakukan Irawati Meuraksa.

Kedua, penggunaan media sosial dalam kampanye politik Meuraksa. Media sosial menjadi strategi yang sangat ampuh dalam melakukan kampanye kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kota Padang tentunya telah menggunakan media sosial untuk melakukan aktivitas dengan metode daring. Fenomena seperti ini menjadikan media sosial sebagai sarana yang paling dibutuhkan oleh setiap kandidat termasuk Irawati Meuraksa untuk bersosialisasi kepada masyarakat.



Kondisi masyarakat Kota Padang yang saat ini menggunakan media sosial sebagai sarana informasi menjadi sangat relevan jika media sosial dijadikan sebagai media untuk berkampanye. Peluang inilah yang peneliti lihat dalam menyampaikan kampanye dan pesan-pesan politik yang disampaikan oleh Irawati Meuraksa. Irawati Meuraksa memaksimalkan segala fasilitas media sosial seperti Instagram, Youtube, Facebook. Dengan demikian masyarakat mendapatkan segala informasi terkait Irawati Meuraksa dengan cepat.



Gambar 1.1 Media Sosial Irawati Meuraksa

Sumber: [facebook.com/irawati Meuraksa](https://www.facebook.com/irawati.meuraksa), [instagram.com/Irawati Meuraksa](https://www.instagram.com/Irawati Meuraksa)

Ketiga, sumber daya ekonomi yang dimiliki Irawati Meuraksa. Irawati Meuraksa memiliki usaha minimarket, yakni Dadas Swalayan, Rili Swalayan, Smile Market. Tentunya modal ekonomi yang dimiliki Irawati Meuraksa memiliki peranan yang sangat penting sebagai roda penggerak dan memperlancar mesin politik yang digunakan. Uang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan kampanye seperti mencetak baliho, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Bahkan modal ekonomi dapat menjadi syarat utama saat calon tersebut bukan berasal dari partai politik yang dicalonkannya. Ketiga, Irawati Meuraksa memiliki tim

sukses yang solid yang memiliki peran sebagai mesin politik yang bertujuan mendapatkan dukungan masyarakat. Irawati Meuraksa dan tim suksesnya melakukan kampanye *door to door* ke rumah-rumah masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Jamaris, saat peneliti melakukan penelitian data awal:

“Irawati maajak Apak untuak maambiak suaro warga disiko, tim suksesnyo dulu datang langsung ka rumah-rumah warga supaya mamilih Irawati, kalau inyo tapiliah nyo bantu warga di sisi bantuan UMKM, mampelokan jalan, dan lain-lain”

“Irawati mengajak Bapak untuk mengambil suara warga di sini, tim suksesnya dulu datang langsung ke rumah-rumah warga agar memilih Irawati, jika dia terpilih dia bantu warga di sini seperti memberikan bantuan UMKM, memperbaiki jalan dan lain-lain”

Dengan turun langsung ke rumah-rumah masyarakat Irawati Meuraksa dapat mensosialisasikan dirinya dan menyampaikan program yang akan dilakukakannya. Salah satunya program UMKM yang ditujukan kepada masyarakat yang akan direalisasikannya ketika terpilih nanti. Selain itu faktor-faktor di atas, juga tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa faktor lain yang nanti peneliti temukan ketika peneliti melakukan penelitian ini.

Peneliti melihat beberapa strategi di atas sesuai dengan teori strategi politik yang digagas oleh Peter Schuder, yakni strategi *offensive* dan *defensive*. Strategi *offensive* (menyerang) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemilihnya sehingga perolehan suara dapat maksimal. Yang termasuk dalam *strategi* ofensif adalah strategi mencari pemilih baru dan strategi menembus persaingan. Pada dasarnya semua strategi *offensive*



ditetapkan saat kampanye pemilu harus menampilkan sesuatu yang jelas dan menarik dibandingkan dengan partai atau kandidat lainnya.

Peneliti melihat Irawati Meuraksa melakukan strategi *offensive*. Dalam strateginya untuk memenangkan pemilu legislatif, Irawati Meuraksa membangun jaringan di luar partai yaitu dengan membentuk tim sukses. Irawati Meuraksa melihat tim sukses dalam pemilihan umum diperlukan sebagai mesin politik yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Dalam strategi *offensive* Irawati Meuraksa juga melakukan kampanye *door to door* ke rumah-rumah masyarakat dengan menyampaikan program-program yang akan direalisasikan saat terpilih nanti, salah satunya program UMKM.

Kemudian dengan modal ekonomi yang dimiliki Irawati Meuraksa tentunya memperlancar kampanye politik yang dilakukannya. Selain itu, Irawati Meuraksa juga menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube untuk mengambil hati masyarakat agar memilih dirinya. Selain itu, dalam strategi *offensive*, juga terdapat peran PAN dalam strategi politik Irawati Meuraksa. Partai Amanat Nasional yang memiliki struktural yang komplit tentunya memudahkan Irawati Meuraksa untuk menyentuh setiap elemen yang ada didalam masyarakat Kota Padang sehingga Irawati berhasil meraih kemenangan. PAN yang menempati peringkat ketiga dalam perolehan suara pileg 2019 tentunya mempunyai peran penting dalam kemenangan Irawati Meuraksa sehingga peneliti berasumsi bahwa peran partai cukup berperan aktif dalam proses kemenangan Irawati Meuraksa.



Menurut peneiliti, Irawati Meuraksa juga melakukan strategi *defensive*. Strategi *defensive* digunakan para calon untuk mempertahankan mayoritasnya atau apabila perolehan suara yang dicapai sebelumnya ingin dipertahankan. Strategi ini dilakukan oleh para calon untuk memelihara pendukungnya dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman mereka sebelumnya pada situasi yang berlangsung. Strategi *defensive* ini melihat segmentasi yang dibidik oleh kandidat. Peneliti melihat segmentasi yang lebih difokuskan Irawati Meuraksa adalah kaum ibu-ibu. Ibu-ibu memiliki loyalalitas yang tinggi dan cenderung antusias dalam memberikan dukungan kepada Irawati Meuraksa. Irawati Meuraksa dapat mempengaruhi mereka untuk memberi dukungan suara kepada dirinya karena memiliki kesamaan identitas. Berdasarkan strategi *defensive* peneliti melihat peran penting Ibu-ibu memenangkan Irawati Meuraksa. Selain itu, juga tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa faktor lain yang nanti peneliti temukan ketika peneliti melakukan penelitian ini.

Berdasarkan dari apa yang peneliti uraikan dan jabarkan maka dengan demikian peneliti berasumsi bahwa Irawati Meuraksa menjalankan strategi politik *offensive* dan *defensive* pada pemilu legislatif 2019 di Kota Padang. Oleh karena itu peneliti merumuskan permasalahan dalam rumusan masalah, yaitu : Bagaimana Strategi Politik yang dijalankan Irawati Meuraksa dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi politik yang dijalankan Irawati Meuraksa pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka di bidang ilmu politik serta diharapkan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya mengenai strategi politik.

2. Manfaat teknis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan masukan mengenai strategi politik khususnya bagi calon kandidat perempuan yang akan maju dalam kontestasi pemilihan legislatif.

